

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Bulan Juli, Harga bahan pokok cenderung stabil dan terkendali. Hanya pada awal bulan Agustus terjadi sedikit kenaikan pada harga beras premium, Harga bawang putih pun cukup tinggi sekitar Rp.45.000/kg yang biasanya sekitar Rp.35.000. Bawang merah cenderung stabil di harga Rp. 28.000 sd Rp. 30.000/kg.

Sampai Akhir bulan September, bisa dilaporkan stok bahan pokok dan bahan pangan aman serta dengan harga yang cenderung stabil baik menjelang 17 Agustus maupun setelahnya.

Beberapa upaya menstabilkan harga adalah dilaksanakannya Gerakan Pangan Murah Oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat di pertengahan bulan Agustus yaitu menjelang Hari Kemerdekaan RI.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kecendrungan terjadi Peningkatan harga menjelang 17 Agustus, seperti Bawang merah, beras premium dll
2. Jika pada Triwulan II terjadi kenaikan harga bawang merah, maka pada triwulan III ini terjadi Kenaikan harga bawang putih, sedangkan harga bawang merah cenderung stabil. Bawang putih yang biasanya dapat dibeli dengan harga Rp. 35.000/kg menjadi Rp. 45.000 per kg bahkan lebih jika kita beli di Kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten.
3. Keadaan topografi dan jenis tanah di Kabupaten Kutai Barat tidak cocok untuk ditanami bawang putih maupun bawang merah. Sehingga tidak banyak petani bawang putih dan bawang merah yang ada di Kabupaten Kutai Barat sehingga untuk memasoknya tetap didatangkan dari Pulau Jawa dan Kota Samarinda.
4. Sebagai daerah yang bukan merupakan sentra produksi, Kabupaten Kutai Barat sangat bergantung kepada pasokan dari luar daerah seperti Samarinda, untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, bawang merah, bawang putih, cabe dan daging ayam ras. Beberapa komoditi tersebut masih disuplay atau dipasok dari daerah lain. Seperti beras dan telur yang banyak dipasok dari Kabupaten Sidrap maupun Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Akses jalan yang masih rusak dan parah di wilayah Kecamatan Bongan dan Perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, sangat mempengaruhi kelancaran distribusi, terjadinya kerusakan pada banyak titik menyebabkan pergerakan harga menjadi naik karena biaya angkut yang lebih besar. Kerusakan disebabkan banyaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit dan CPO yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan jalan ini sudah seringkali dilaporkan ke Pihak Provinsi maupun Pusat. Pemerintah Kabupaten tidak bisa menganggarkan perbaikan karena status jalan Negara.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 – 7 Agustus 2024, bertempat di Halaman Gedung PKK Kab.Kutai Barat dilaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Persiapan HUT RI ke 79, dengan Barang yang dijual : Beras SPHP (5kg) Rp. 56.500, Beras Premium KITA (5 kg) Rp.69.000, Minyak Goreng Promoo Rp.16.500/liter, Gula Konsumsi Rp. 17.500/kg, telur ayam Rp.56.000/30 butir, Bawang merah Rp.28.000/kg dan bawang putih Rp. 39.000/kg.
2. Pada tanggal 17 – 18 Agustus 2024, bertempat di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Barat dilaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka HUT RI ke 79 dengan Barang yang dijual : Beras SPHP (5kg) Rp. 56.500, Beras Premium KITA (5 kg) Rp.69.000, Minyak Goreng Promoo Rp.16.500/liter, Gula Konsumsi Rp. 17.500/kg, telur ayam Rp.56.000/30 butir, Bawang merah Rp.28.000/kg dan bawang putih Rp. 39.000/kg. Dengan Kapasitas Beras SPHP 7.500 Kg, Beras Kita Premium 1.500 Kg, Minyak goreng 500 liter dan gula pasir 500 Kg serta sembako dari pihak ketiga
3. Pada tanggal 25 September 2024 di Balikpapan, dilaksanakan Penandatanganan MOU antara Perum Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara dengan Pemkab Kutai Barat tentang Kerjasama Program Stabilitas Pasokan dan harga pangan serta pemenuhan/ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Barat
4. Pengawasan LPG 3 kg dan solar bersubsidi tetap terus dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Bagian Perekonomian di 16 Kecamatan dimulai dari bulan Agustus sd September 2024

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu lebih sering berkoordinasi dengan TPID Provinsi Kaltim dan Bank Indonesia dalam upaya-upaya Pengendalian Inflasi di Kabupaten Kutai Barat
2. Perlu intents dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah tidak hanya menjelang Hari Besar Keagamaan namun saat ada beberapa komoditi pangan yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan
3. Perlu adanya sosialisasi dan rapat koordinasi dengan OPD teknis terkait dalam hal penyusunan laporan triwulan TPID Kabupaten Kutai Barat.
4. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens dengan pihak kecamatan terkait dalam hal pemantauan stok dan harga barang menjelang Hari Besar Keagamaan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah tetap terus menerapkan 4 (empat) strategi Pengendalian Inflasi, antara lain :
 - Keterjangkauan harga, dapat dilaksanakan dengan cara Gerakan Pangan murah

sehingga masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga yang lebih rendah. Selain itu dapat juga sering-sering dilaksanakan pasar murah dengan sistem subsidi harga barang sehingga harga bahan pokok menjadi lebih murah

- Ketersediaan Pasokan, Pemerintah dan TPID Kutai Barat harus terus memperhatikan dan memantau ketersediaan pasokan bahan pokok dan bahan pangan sehingga tidak terjadi kelangkaan. Gerakan pangan murah juga disarankan untuk menjaga ketersediaan pasokan di Kutai Barat
- Kelancaran distribusi, Pemerintah dan TPID Kutai Barat harus memperhatikan akses jalan yang menghubungkan Kutai Barat dengan Kab/Kota lain yang berperan penting dalam menyuplai kebutuhan pokok yang dibutuhkan Kutai Barat, contoh : Akses jalan Kutai Barat ke Samarinda harus diperhatikan.
- Komunikasi yang efektif, dalam hal ini Pemerintah dan TPID Kutai Barat harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok serta upaya-upaya menstabilkan harga.

2. Perlunya ditingkatkan Kerjasama Antar Daerah khususnya dengan Daerah penghasil komoditi

3. Koordinasi dengan stake holder seperti Pelaku Usaha/ Masyarakat, Bulog, Pertamina maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan sehingga ketersediaan/stok tetap terjaga dan harga barang di Kabupaten Kutai Barat tetap stabil.